



BAB II

Telaah Pustaka dan Kerangka Pemikiran

A. Pengantar

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari setiap variabel, kerangka pemikiran yang merupakan gabungan dari berbagai hipotesis yang dikembangkan untuk menjawab batasan masalah. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai rumusan hipotesis yang akan diajukan.

B. Telaah Pustaka

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. (Tilt, 1994, dalam Haniffa et al, 2005) berpendapat bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan dalam kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom, 1994, dalam Haniffa et al, 2005).

O'Donovan (2002) dalam Nor Hadi (2011:87) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk



bertahan hidup. Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam.

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori *legitimacy* adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial, sebagai berikut:

“Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan, beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, di mana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki”.

Jadi, pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung di dalam masyarakat. Jika suatu perusahaan memenuhi kontrak implisit dengan *stakeholder*, *stakeholder* akan bertindak sebagaimana yang diinginkan perusahaan. Sebaliknya, ketika implisit kontrak dengan *stakeholder* tidak dipenuhi, maka terjadi kemungkinan kontrak yang implisit tersebut tentu saja akan berubah menjadi suatu hal yang eksplisit dan akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Biaya yang tinggi tersebut disebabkan oleh masyarakat menolak melegitimasi keberadaan perusahaan di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara melaksanakan program-program yang sesuai dengan harapan masyarakat. Implementasi lainnya adalah melalui pelaksanaan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengungkapkannya baik di dalam *annual report* maupun *sustainability report* sebagai salah satu bentuk informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat

2. Stakeholder Theory

Pertanggungjawaban sosial perusahaan terkait erat hubungannya dengan *stakeholder theory*. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya berorientasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat terhadap *stakeholdernya* yang meliputi; pemegang saham, kreditor, supplier, pemerintah, masyarakat. Hal tersebut menjelaskan keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi dukungan yang diberikan oleh *stakeholdernya* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri 2007:409). Keberlangsungan usaha suatu perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan perusahaan harus mencari dukungan tersebut sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut dengan berbagai hal salah satunya pertanggungngjawaban sosial perusahaan yang dapat memberikan image baik terhadap perusahaan tersebut.

Stakeholders suatu perusahaan tersebut memiliki *power stakeholders*. *Power stakeholders* merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. *Power stakeholders* ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber-sumber tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Ulman (dalam Ghozali dan Chariri, 2007), ketika *stakeholders* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan *stakeholders*. Lebih lanjut menurutnya, organisasi akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memilih *stakeholders* yang dianggap penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dan *stakeholdersnya*

3 Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Menurut Michael C. Jensen dan W. H. Meckling (1976) dalam Amanita Novi Yushita (2010:57), ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*), dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Sedangkan *positive accounting theory* secara implisit mengakui tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen (*bonus plan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hypothesis), kreditur dengan manajemen (*debt/equity hypothesis*), dan pemerintah dengan manajemen (*political cost hypothesis*).

Teori keagenan dapat dipandang sebagai model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

William R. Scott (2000) dalam Amanita Novi Yushita (2010:57), menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya, dimana antara *agent* dan *principal* ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Kedua jenis kontrak ini sering kali dibuat berdasarkan angka laba bersih, oleh karena itu kontrak tersebut mempunyai implikasi terhadap akuntansi.

Manajemen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau *principal*, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, *principal* sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non-finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh *principal* untuk memberikan insentif pada *agent*. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi



kedua belah pihak dalam menanggung resiko. *Agent*, yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya, tetapi akses pada informasi internal perusahaan terbatas akan meminta manajemen memberikan informasi selengkapnya. Keinginan *principal* tersebut pada umumnya sangat sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor seperti biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi dan sebagainya.

Agent memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal*, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utilitynya*. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Masalah keagenan (*agency problem*) sebenarnya muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Menurut teori keagenan, salah satu mekanisme yang secara luas digunakan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan *principal* dan *agent* adalah melalui mekanisme laporan keuangan. Dalam akuntansi laba (biaya) yang sudah menjadi hak (kewajiban) dalam periode sekarang, belum diterima (dibayarkan) secara tunai, maka angka-angka dalam laporan keuangan mengandung komponen akrual. Komponen ini berada di bawah kebijakan manajemen (*discretionary*) maupun tidak (*non discretionary*) (Slamet Sugiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1998 dalam Amanita Novi Yushita, 2010:58). Adanya kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*) dan tingkat asimetri informasi yang tinggi, ditambah motif-motif tertentu, kemungkinan pihak manajemen memanfaatkan pos-pos aktual guna menyajikan laba yang sesuai dengan kepentingannya, yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, seperti pemilik, pemegang saham, atau pemberi pinjaman.

Namun, pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kekurangannya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada.

4) Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Pengertian dan Tujuan Pengungkapan

Dalam Suwardjono (2010:578) Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2010:578) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

"Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statements themselves, the notes to the statements, and the

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI IKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI IKG.



supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements."

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

"Pengungkapan berarti menyediakan informasi dalam laporan keuangan, yang meliputi laporan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan tambahan pengungkapan yang berkaitan dengan laporan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal."

Dengan kata lain, pengungkapan berarti penyediaan informasi didalam laporan keuangan yang mencakup laporan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan laporan keuangan.

Secara lebih spesifik, Wolk *et. al.* (2001) dalam Suwardjono (2010:579) menginterpretasi pengertian pengungkapan sebagai berikut:

"Broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both the financial statements and supplementary communications including footnotes, post-statement events, management's discussion and analysis of the operations for the forthcoming year, financial and operating forecast, and additional financial statements covering segmental disclosure and extentions beyond historical cost."

Dengan kata lain, pengungkapan berfokus pada laporan keuangan dan sarana komunikasi tambahan seperti catatan kaki, *post-statement events*, diskusi manajemen dan analisis operasi untuk tahun-tahun mendatang, ramalan keuangan perusahaan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan laporan keuangan tambahan yang mencakup pengungkapan segmen berdasarkan biaya historis.

C biaya historis.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka definisi konseptual dari pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam suatu laporan keuangan yang mencakup laporan itu sendiri yang menyajikan kondisi keuangan yang wajar dan sebenarnya serta informasi tambahan melalui catatan kaki, analisis, ramalan, dan laporan segmen.

Sedangkan fungsi atau tujuan pengungkapan disampaikan dalam Suwardjono (2010:580) yaitu sebagai berikut:

(1) Tujuan melindungi

Pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*).

(2) Tujuan informatif

Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakainya.

(3) Tujuan kebutuhan khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada bahan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Konsep dan definisi Tanggung Jawab Social Perusahaan

Belum terdapat definisi tunggal mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR), namun banyak peneliti maupun lembaga yang telah mengembangkan ide maupun pandangan mengenai CSR. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perusahaan harus berkomitmen untuk senantiasa berorientasi kepada lingkungan sosialnya, seperti memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perusahaan harus berkomitmen untuk senantiasa berorientasi kepada lingkungan sosialnya, seperti memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan masyarakat.

Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan berfokus pada pencapaian laba, juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, Revisi 2009, paragraf ke dua belas yang berbunyi sebagai berikut:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



"Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan

C mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Dengan kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. *Corporate Social Responsibility* berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dimana terdapat pengkomunikasian mengenai informasi sosial perusahaan berupa dampak sosial selama perusahaan beroperasi dan biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ⓒ Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Pratiwi dan Djamhuri (2004) mengartikan pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada *stakeholders* mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan, bahwa laporan tahunan (annual report) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan.

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai *Social Responsibility Accounting (SRA)* atau akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ikatan Akutan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2007) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut : “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Guthrie dan Parker (1990) dalam Sayekti dan Wondabio (2007) menyatakan bahwa dalam Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.

d. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bradshaw dalam Harapan (2008: 400-401) mengemukakan 3 bentuk tanggung jawab sosial perusahaan:

1) Sumbangan Perusahaan (*corporate philanthropy*)

Tanggung jawab perusahaan terbatas pada kedermawanan atau kerelaan saja belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

2) Tanggung Jawab Perusahaan (*corporate responsibility*)

Kegiatan pertanggung jawaban sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena ketentuan undang-undang atau bagian dari kesediaan atau kemauan perusahaan.

3) Kebijakan Perusahaan (*corporate policy*)

Tanggung jawab perusahaan sudah merupakan bagian dari kebijakan.



5. *Good Corporate Governance*

Latar belakang *Good Corporate Governance*

Dalam beberapa tahun terakhir ini istilah “*Corporate Governance*” semakin sering dijadikan topik pembicaraan, dimana gagasan *corporate governance* muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku bisnis yang dilaksanakan perusahaan. Di masa lalu tujuan perusahaan semata-mata untuk mengejar keuntungan financial (*single bottom line*) dan mengabaikan faktor-faktor lain. Konsep ini semakin bergeser karena tuntutan masyarakat semakin sadar bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingannya. Konsep *triple bottom line* yang bertumpu pada *profit oriented*, *responsibility society*, *sustainable growth* menjadi konsep baru yang harus dipenuhi perusahaan. Naiknya nilai saham, praktek bisnis yang sehat dipenuhi pasokan barang dan perhatian terhadap pelanggan produk-produk berkualitas. Hak-hak pekerja dan standar upah buruh, isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan bagian dari lingkungan perusahaan yang harus diperhatikan manajemen. Tuntutan dan kontrol dari berbagai pihak inilah yang mendorong perusahaan harus menerapkan *good corporate governance*.

Secara teoritis, praktik *good corporate governance* dengan baik dapat meningkatkan nilai perusahaan (*firm value*) dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh direksi dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan pada akhirnya secara umum, *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Definisi Good Corporate Governance

Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksir konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Publication 2006 mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal dan external shareholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled (taken from Cadbury Committee of United Kingdom). The objective of corporate governance is to create added value to the stakeholders.”

[Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau sistem yang mengendalikan perusahaan (diambil dari Cadbury Comitee of United Kingdom). Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambahan bagi *stakeholders*.]

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Good Corporate Governace secara definitif merupakan sistem yang mengatur

dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparants terhadap semua inforamasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Mekanisme *Good Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan, misalnya pemegang saham(*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*bondholders*), dari perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan control terhadap manajer (Shleiver dan Vishny, 1997), yang meliputi mekanisme internal, seperti struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kompensasi tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*) (Bamhart, dan Rosenstein, 1998).

Mekanisme GCG dibagi menjadi dua kelompok. Pertama yaitu *internal mechanisms* (mekanisme internal), seperti pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, komite audit. Yang kedua adalah *external mechanisms* (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan *level debt financing*. Kedua mekanisme *corporate governance* ini diharapkan dapat memastikan tindakan pihak manajemen untuk bertindak bagi kepentingan shareholders terutama pemegang saham minoritas (Che Haat *et al*, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian ini faktor-faktor mekanisme *corporate governance* juga

dikorelasikan dengan tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.

Ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan institusi berkorelasi positif dengan pengungkapan CSR (Haniffa dkk, 2005; Sembiring, 2005; Anggraini, 2006; Sayekti, 2006;) (Sayekti dan Wondabio, 2007). Novita dan Djakman (2008) menghubungkan kepemilikan asing dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR. Dalam penelitian ini mekanisme good corporate governance menggunakan variabel struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan saham manajerial, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud,2008). Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan (Brancato dan Gaughan,1991 dalam Fauzi, Mahoney, dan Rahman,2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga *agency cost* yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat.

2. Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan saham oleh pihak manajemen adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Penunjukan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan, oleh Jensen dan Meckling (1976:218) disebut sebagai pemisahan fungsi *decision making* dan *risk bearing*. Keadaan tersebut akan memunculkan perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, pemegang saham sebagai penyedia dan fasilitas untuk operasional perusahaan. Di lain pihak, manajer sebagai pengelola perusahaan akan menerima gaji dan berbagai bentuk kompensasi lainnya. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer diharapkan yang terbaik bagi pemegang saham yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya melalui peningkatan nilai perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (*outsider ownership*), sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

3. Komposisi dewan komisaris independen

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI, 2001). Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

4. Ukuran Komite audit

Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan dan kantor akuntan publik. Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit (KNKG 2006) adalah: Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, menindak lanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya dan merekomendasikan seleksi auditor eksternal. Salah satu cara komisaris mempertahankan independensinya adalah dengan membentuk komite audit. Sesuai dengan fungsi komite audit di atas, sedikit banyak keberadaan komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 tugas komite audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Penelitian tentang hubungan komite audit terhadap daya informasi laba telah dilakukan oleh Petra (2002) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak meningkatkan daya informasi laba. Sedangkan Beasley (1996) menemukan bahwa komite audit tidak mampu menurunkan kecurangan laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Profitabilitas

Secara umum, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Gary Donovan dan Kathy Gibson (2000) dalam Eddy Rismanda Sembiring (2003:24) menyebutkan bahwa berdasarkan teori legitimasi, profitabilitas memiliki hubungan yang negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sedangkan pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca "*good news*" kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.

Profitabilitas adalah hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Brigman & Houston, 2006), dimana rasio ini digunakan sebagai alat pengukur atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian pengukuran profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan tingkat efektifitas manajemen secara menyeluruh dan tidak langsung pada investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ini. Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan bukan saja untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun juga memperkuat kondisi keuangan perusahaan.

Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan pengaruh dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi (Brigham & Houston, 2006). Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas adalah *gross profit margin*, *operating profit margin*, *net profit margin*, *Return on Equity* dan *Return on Assets* (Syamsudin 1985;55, dalam ahmar dan Kurniawan,2007).

Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Gross profit margin*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan prosentase dari laba kotor dibandingkan dengan *sales*. *Operating Profit* merupakan rasio yang mengitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum adanya pajak dan bunga dari penjualan yang dilakukan. Rasio ini menggambarkan apa yang disebut “*pure profit*” yang diterima atas setiap Rupiah dari penjualan yang dilakukan. *Operating Profit* disebut murni (*pure*) dalam pengertian bahwa jumlah tersebut yang benar-benar diperoleh dari hasil operasional perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. *Net Profit Margin* adalah rasio profitabilitas yang menghitung sejauh mana perusahaan dalam menghasilkan laba setelah dipotong pajak dan bunga dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka makin baik profitabilitas suatu perusahaan. *Return on equity* (*ROE*) menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income* yang tersedia bagi pemegang saham. Semakin tinggi *return* adalah semakin baik karena berarti deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga akan makin besar. *Return on Asset* (*ROA*) menunjukkan seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif penggunaan aktivitas tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan yang berbeda dapat diukur berdasarkan tingkatannya yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas agar terlihat variabel-variabel berupa rasio-rasio yang berpengaruh terhadap komponen laba. disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya jumlah sample dan periode

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ROE sbagai proksi dari profitabilitas.



7) *Leverage*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk menjalankan operasinya perusahaan memerlukan dana. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan modal sendiri maupun dengan modal pinjaman. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Agar dapat saling menunjang, perlu disiasati dengan melakukan kombinasi dari masing-masing jumlah sumber dana. Besarnya penggunaan masing-masing sumber dana harus dipertimbangkan agar tidak membebani perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman harus dibatasi. Kombinasi dari penggunaan dana dikenal dengan nama rasio penggunaan dana pinjaman atau utang atau dikenal dengan rasio solvabilitas atau rasio *leverage*.

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio *leverage* yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi.

Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio *leverage* dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, disamping aktiva yang dimilikinya (ekuitas).

8. Peneliti terdahulu

Tabel 2.1
Tinjauan peneliti terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
Sembiring (2005)	<ul style="list-style-type: none"> Independen: Size,profitabilitas,Profile perusahaan, ukuran dewan komisaris dan leverage 	Ukuran perusahaan, profil perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan CSR, sedangkan variabel profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: CSR Disclosure 	<p>menunjukkan hubungan dengan pengungkapan CSR.</p>
<p>1. Riarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Anggraini (2006)</p> <p>Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p> <p>Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: Kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas • Dependen: CSR disclosure 	<p>Hasil penelitian Anggraini menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi. Kepemilikan manajemen, tipe industri menjadi bahan pertimbangan untuk pengungkapan CSR.</p>
	<p>Puspitasari (2009)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: Kepemilikan asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri, tipe industri, profitabilitas • Dependen: CSR disclosure 	<p>Hasil penemuan menyebutkan bahwa Faktor kepemilikan saham asing, kepemilikan saham public, ukuran industri dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.</p>
	<p>Ramasita (2007)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : Kepemilikan manajemen, tingkat leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas 	<p>(1) Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang signifikan antar faktor-faktor perusahaan, (2) Variabel kepemilikan manajemen</p>



	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: Pengungkapan Sosial 	<p>mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial</p>
<p>1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pelanggaran hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p>	<p>Said <i>et al</i> (2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: board size, board independence quality, audit committee managerial, foreign government ownership • Dependen: CSR Disclosure 	<p>Government ownership dan audit committee berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan public Malaysia</p>
<p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Riska Anggita Sa (2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: Profile, size, profitailitas, leverage dan growth company • Dependen: Pengungkapan sosial 	<p>Variabel size dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap CSR. Sedangkan, profile, leverage dan growth company berpengaruh negatif terhadap CSR</p>
	<p>Juca Lucyand dan Lasy Graciapriila Si (2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Var. independen: ukuran perusahaan,profitabilitas, profil perusahaan,earning per share,kepedulian lingkungan, leverage, ukuran dewan komisaris, size, kepemilikan 	<p>Leverage, ukuran dewan komisaris, size, kepemilikan manajemen dan peluang pertumbuhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR disclosure. ukuran perusahaan, profitabilitas,profil perusahaan,earning per share,kepedulian lingkungan mempunyai pengaruh yang</p>



	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>manajemen dan peluang pertumbuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Var. dependen: CSR Disclosure 	<p>signifikan terhadap CSR disclosure</p>
--	---	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kerangka Pemikiran

Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah baik intern maupun ekstern perusahaan. Masalah intern misalnya antara kepentingan perusahaan dan manajer, yang disebut masalah keagenan. Sedangkan ekstern misalnya masalah antara perusahaan dengan pembaca laporan keuangan yang meliputi kreditor, investor, maupun pengambil keputusan lainnya.

Sejak dikeluarkannya UU PT No. 40 tahun 2007, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosialnya selama melakukan proses produksi dan hasil produksinya di dalam laporan tahunan. Dalam kaitannya dengan pengungkapan sosial perusahaan, seringkali perusahaan mencoba menyembunyikan pengungkapan ini karena takut berdampak buruk pada perusahaan sendiri, seperti menurunnya kepercayaan investor dalam berinvestasi ataupun kepercayaan kreditor dalam meminjamkan dananya pada perusahaan. Hal-hal seperti itu dapat menyebabkan merosotnya performa perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya sehingga berujung dengan menurunnya nilai perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



saham manajerial, ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek Indonesia.

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi lebih fleksibel dalam melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi tingkat Profitabilitasi maka akan semakin memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR untuk mendapatkan legitimasi dan nilai positif dari stakeholders

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan keluwesan kepada manajer untuk melaksanakan dan mengungkapkan CSR. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan sangat mempertimbangkan pelaksanaan dan pengungkapan CSR, karena khawatir akan mengganggu operasional perusahaan.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Rasio *leverage* merupakan kemampuan perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi. Pada saat perusahaan mempunyai utang bunga yang tinggi, kemampuan manajemen untuk berinvestasi lebih pada program CSR adalah terbatas.

Semakin tinggi tingkat rasio *leverage*, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan



berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. Biaya CSR yang terbatas, maka pengungkapan informasi sosial menjadi rendah atau terbatas.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional dapat memberikan masukan dan arahan kepada manajemen ketika manajemen tidak melakukan aktivitas positif seperti pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena akan berdampak positif bagi berkelanjutan perusahaan di masa mendatang. Kepemilikan institusional dapat memberikan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan aktivitas positif tersebut. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan institusional. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga *agency cost* yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat.

4. Pengaruh Kepemilikan saham manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepemilikan saham manajerial merupakan salah satu upaya untuk mengurangi konflik agensi atau kepentingan antara manajer dan pemilik. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajemen akan secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Melalui kepemilikan saham manajerial ini terjadi pemisahan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer diharapkan yang terbaik bagi pemegang saham yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya melalui peningkatan nilai perusahaan. Dengan demikian kepemilikan manajerial akan secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah.

5. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Keberadaan dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Dengan demikian, semakin besar komposisi dewan komisaris maka kemampuan dewan komisaris untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif.

6. Pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Pembentukan komite audit akan memastikan bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.

Sedikit banyak keberadaan komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, diharapkan dengan ukuran komite audit yang semakin besar, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan semakin meningkat dan luas..

Berikut ditampilkan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

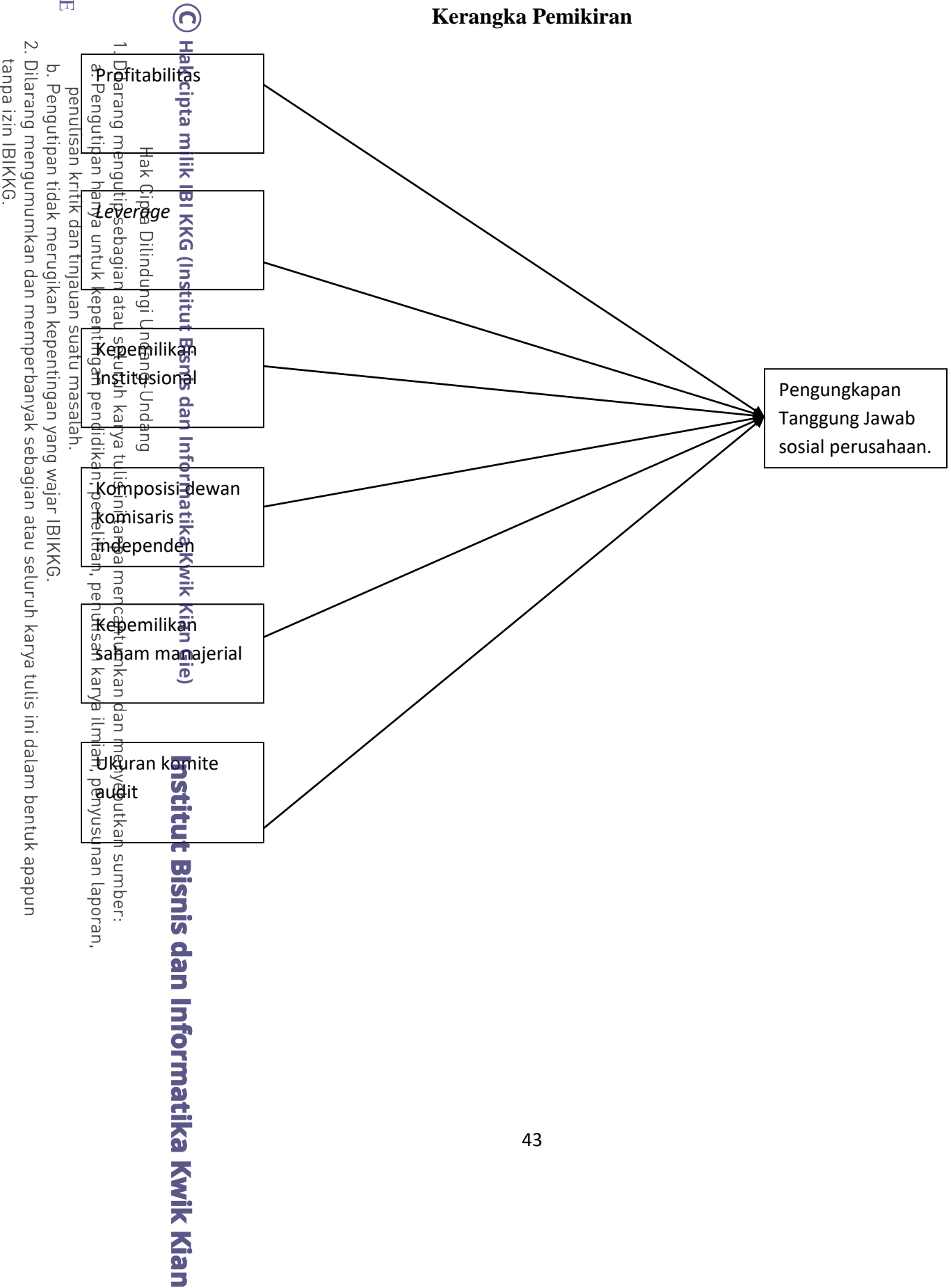
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran





Berdasarkan masalah dan teori-teori yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

- Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Ha₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ha₂: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ha₃: Kepemilikan institusional perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ha₄: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ha₅: Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ha₆: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.